



Perpanjangan Moratorium Hotel Masih Dikaji

● ERIC ISKANDARSJAH

YOGYAKARTA – Tingginya pertumbuhan pembangunan hotel di Yogyakarta sempat menimbulkan beberapa persoalan. Mulai dari persoalan ekonomi hingga isu lingkungan. Hal itu ditindaklanjuti dengan adanya moratorium pembangunan hotel baru yang saat ini masih berlangsung.

Itu artinya, selama periode moratorium, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak akan memberikan izin pembangunan hotel baru. Saat ini, moratorium masih berlaku sesuai Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55

Tahun 2016 yang menyatakan bahwa moratorium berakhir pada Desember 2017.

Wali Kota Yogyakarta, Harjadi Suyuti mengatakan, saat ini ia tengah mengkaji lagi apakah moratorium hotel akan kembali diperpanjang. Mengingat, moratorium akan segera berakhir pada tahun ini dan moratorium ini juga merupakan perpanjangan moratorium yang seharusnya telah berakhir pada 2016.

"Saat ini moratorium masih berlaku. Sehingga jika ada pihak yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dikenakan sanksi," ujarnya Kamis (14/9).

Perpanjangan moratorium pembangunan hotel di Kota Yogyakarta ini tertuang dalam Perwal Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 untuk menggantikan Perwal Nomor 77 Tahun 2013 tentang Moratorium Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel.

Dalam perwal lama dinyatakan bahwa moratorium penerbitan IMB hotel ditetapkan sejak 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2016. Namun dalam perwal baru tersebut moratorium penerbitan izin IMB diperpanjang hingga 31 Desember 2017.

Beberapa hal yang menentu-

kan periode moratorium di antaranya adalah okupansi dari seluruh hotel yang ada di Yogya. Moratorium boleh jadi tetap diperpanjang jika hingga saat ini okupansi rata-rata hotel belum menyentuh angka 70 persen.

Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, tingkat okupansi hotel di Yogyakarta pada 2016 belum mencapai 70 persen. Rinciannya, hotel berbintang di wilayah ini hanya mencatatkan okupansi rata-rata sebesar 56 persen.

Sedangkan hotel non-bintang okupansinya hanya 28 persen. PHRI DIY mencatat, saat ini di Yogyakarta total ada 86 hotel berbintang dengan sekitar 8.600 kamar dan 1.100 hotel non-bintang dengan sekitar 12.500 kamar.

Sebelumnya, pengembang hotel di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta yang sebelumnya dinyatakan melanggar izin mendirikan bangunan kini mengubah permohonan izin menjadi izin pondokan eksklusif.

Sudah sekitar satu pekan lalu kami menerima permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan di lokasi tersebut berupa izin indeks eksklusif 90 kamar," kata Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta Setiyono, Selasa (12/9).

Menurut dia, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta masih terus melakukan kajian terhadap izin yang diajukan dengan mendasarkan pada rencana detail tata ruang wilayah, termasuk operasional pondokan tersebut. Berdasarkan peraturan yang berlaku, lanjut Setiyono, izin operasional pondokan menjadi kewenangan kecamatan, namun ada berbagai faktor yang perlu diperhatikan untuk penyelenggaraan pondokan.

■ edi: fersan rahadi

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan | <input type="checkbox"/> Negatif | <input type="checkbox"/> Amat Segera | <input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi |

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005